



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sangkale, 06 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir , Salu Ampak 27 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Perkawinan yang telah di langungkan di Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten. Luwu Utara pada tanggal 29 September 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0179/ 013/ IX/ 2019;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama yang terletak di xxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama Membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (Satu ) orang anak yang bernama ;

- ANAK lahir pada tanggal 19 Mei 2019

4. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mampu di pertahankan selama  $\pm$  7 (Tujuh) tahun saja terhitung sejak tahun 2015 sampai 2023 ;

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang di sebabkan karena tergugat sudah seringkali marah-marah tidak jelas dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul serta menendang Penggugat;

6. Bahwa selain dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Tergugat selama membina rumah tangga tidak pernah mendapatkan kebahagiaan oleh karena Tergugat sering menyembunyikan uang serta mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa selain dari alasan tersebut di atas juga selama membina rumah tanggat Tergugat juga pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah dan hal tersebut di lakukan Tergugat selama berulang kali;

8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di bicarakan oleh keluarga namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat Memilih jalan terbaik yaitu cerai;

9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sifat egois Tergugat dan sudah saling hidup sendiri-sendiri sehingga demi menghindari fitnah dan Penggugat juga tentu ingin hidup tanpa beban sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Jatuh Talak satu Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas berkenan Majelis Hakim yang arif dan bijaksana tidak lupa dihaturkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba yang relaas panggilannya Nomor 497/Pdt.G/2023/PA.Msb tertanggal 07 Desember 2023 dan tanggal 18 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK. 7322044610990001 tanggal 27 Agustus 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/ 013/ IX/ 2019 Tanggal 29 September 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I, SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama yang terletak di xxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi melihat lebam bekas pukulan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah seringkali marah-marah tidak jelas dan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul serta menendang Penggugat dan Tergugat sering main judi online cip;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II, SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama yang terletak di xxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi melihat langsung bekas pukulan pada bagian pipi Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah seringkali marah-marah tidak jelas dan melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul serta menendang Penggugat dan Tergugat sering main judi online cip;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan hal tersebut juga sesuai kaidah dalam Kitab *Al Anwar Li A'mali Al Abrar* Juz III halaman 511 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan Penggugat memeriksa bukti-bukti, serta memutus perkara tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, agama dan status pernikahan serta alamat tempat tinggalnya yang dibuat oleh Pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 September 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah kediaman Penggugat (rumah orang tua Penggugat) untuk menjemput Penggugat kembali untuk tinggal bersama kembali, sehingga sampai saat itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan bersabar dan kembali kepada suaminya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah bersama yang terletak di xxxxx xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran sejak bulan April 2016 yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat sudah seringkali marah-marah tidak jelas dan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul serta menendang Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sering menyembunyikan uang serta mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat pernah datang menemui dan Penggugat untuk menjemput Penggugat dan kembali hidup bersama;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, tidak lagi terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk berpisah atau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dan trauma dengan sikap dan prilaku Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2019 yang tercatat pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun (*ba'da dukhul*);

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi dan mengayomi Penggugat sebagai istri yang harus dilindungi dan diperlakukan dengan lembut;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan rumah menikah dan membangun rumah tangga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan terwujudnya rasa saling cinta dan kasih sayang diantara suami istri, namun hal ini tidak lagi terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengalami tindakan kekerasan oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri dengan Tergugat sebagaimana pendapat Imam Malik dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai atas suaminya (Tergugat) ke Pengadilan Agama karena melihat adanya hal-hal dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang dengan hal itu, hukum Allah SWT tidak lagi ditegakkan, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab *Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun* halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa jika seorang istri sudah semakin tidak senang kepada suaminya karena adanya hal-hal atau sikap serta perilaku suaminya yang tidak layak dalam hubungan rumah tangga, maka dibenarkan bagi seorang istri itu mengajukan gugatan perceraian kepada Qadhi/hakim (pengadilan) dan jika alasan Penggugat dapat dibenarkan, maka qadhi/hakim dapat memutuskan pernikahan tersebut dengan putusan thalak satu (thalak satu bain sughra) Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وَ إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat melakukan tindak kekerasan verbal dan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 bulan tanpa komunikasi yang baik, dan Tergugat juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik itu nafkah lahir maupun nafkah bathin, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil yang pada akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 bulan, berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam angka (f);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwasanya jika tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dalam kondisinya seperti sekarang ini, dimana Penggugat sebagai istri tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri berupa hak perlindungan, hak disayangi dan diperlakukan dengan baik, nafkah maddhiyah untuk kehidupan sehari-harinya dan juga tidak pula mendapatkan nafkah biologis yang menjadi kebutuhan fitrah manusia, maka sama saja bahwa majelis hakim menghukum Penggugat dengan penjara seumur hidup, dan hal ini sangat bertentangan dengan ruh keadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholag** yang berbunyi sebagai berikut :

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ جِئْنَ تَصْطَرِبُ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ تَصَحُّ  
وَلَا صَلَاحٌ حَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الرَّوْجِيَّةَ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ  
يُخَكِّمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّيِّئِ الْمُوَيَّدِ، وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Masamba yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **H. Asis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Hasyim, Lc** dan **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota I,

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**

Hakim Anggota II,

ttd

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**H. Asis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Mahyomi, S.H**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 16.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 186.000,00       |

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Khumaeni, S.H.I., M.H**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2023/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)